

STRUKTUR PENDAPATAN DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA NELAYAN PADA KAWASAN MINAPOLITAN

STRUCTURE OF INCOME AND HOUSEHOLD EXPENDITURE OF FISHERMEN IN MINAPOLITAN AREA

Jamilah¹, Mawardati¹

¹Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Malikussaleh
Jl. Tengku Nie Reuleut, Muara Batu, Aceh Utara 24355
Email: jamilah@unimal.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis struktur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga nelayan pada kawasan minapolitan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *explanatory research* dengan metode survei (*Survey Method*). Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Aceh Timur sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013. Struktur pendapatan rumah tangga nelayan merupakan rangkaian sumber pendapatan yang diperoleh nelayan dan anggota keluarganya, baik yang bersumber dari kegiatan perikanan seperti menangkap ikan, pengolahan ikan, pemasaran ikan maupun dari sumber lain diluar kegiatan perikanan. Pendapatan nelayan ditentukan oleh fluktuasi harga ikan dan besarnya tangkapan yang dipengaruhi oleh fluktuasi musim tangkapan, sarana penangkapan ikan, dan sistem bagi hasil antara nelayan dengan pemilik modal. Pola hubungan eksploitatif antara pemilik modal dengan nelayan, serta usaha penangkapan nelayan yang bersifat musiman menyebabkan nelayan miskin di kawasan pesisir cenderung sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan dan hutang dengan pemilik kapal. Alokasi pengeluaran terbesar adalah pengeluaran pangan sebesar 80,7%, pengeluaran non pangan sebesar 13,9%, sedangkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan sebesar 5,4%. Pengembangan Kabupaten Aceh Timur melalui Program Minapolitan belum memberikan hasil maksimal, saat ini berada pada tahap pengembangan infrastruktur dan belum mencapai tahap pengembangan sumberdaya perikanan terutama nelayan. Pengembangan perikanan dan potensi sumberdaya perikanan dengan pendekatan pengembangan agroindustri perikanan melalui program minapolitan diharapkan dapat mengatasi masalah fluktuasi harga ikan, menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja, mengurangi ketergantungan terhadap pemilik modal, dan meningkatkan pendapatan nelayan.

Kata kunci: struktur pendapatan, pengeluaran, nelayan, kawasan, minapolitan

ABSTRAK

The research objective was to analyze the structure of income and expenditure of fishermen households in the minapolitan area. This study uses an explanatory research approach with survey methods (*Survey Method*). The research location was established in East Aceh District as an area of fisheries based on the decision of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 35 / KEPMEN-KP / 2013. Fishermen's household income structure is a series of sources of income obtained by fishermen and their family members, both from fishing activities such as fishing, fish processing, marketing of fish and from other sources outside of fisheries activities. Fishermen's income is determined by fluctuations in fish prices and the amount of catch that is affected by fluctuations in catch season, fishing facilities, and profit sharing systems between fishermen and capital owners. The pattern of exploitative relationships between owners of capital and fishermen, as well as fishing efforts that are seasonal, make poor fishermen in coastal areas tend to find it difficult to get out of poverty and debt with ship owners. The biggest expenditure allocation is food expenditure by 80.7%, non-food expenditure by 13.9%, while spending on education and health by 5.4%. The development of the East Aceh District through the Minapolitan Program has not provided maximum results, is currently in the stage of infrastructure development and has not yet reached the stage of developing fisheries resources, especially fishermen. The development of fisheries and the potential of fisheries resources with the approach of developing fisheries agro-industry through the Minapolitan program are expected to overcome the problem of fluctuations in fish prices, create added value and employment opportunities, reduce dependence on capital owners, and increase fishermen's income.

Keywords: structure of income, expenditure, fishermen, area, minapolitan

1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Aceh Timur ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 35/KEPMEN-KP/2013, Tanggal : 2 Juli 2013, Tentang Penetapan Kabupaten Aceh Timur Sebagai Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap dan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya. Subsektor Perikanan Kabupaten Aceh Timur berpotensi untuk dikembangkan karena terletak pada kawasan segitiga pertumbuhan kerjasama Indonesia-Thailand-Malaysia (IMT-GT), ketersediaan sumberdaya perikanan, infrastruktur, dan terbukanya peluang pasar ekspor produk perikanan. Namun demikian sumberdaya ini belum mampu mengangkat taraf kehidupan masyarakat pesisir. Walaupun pemanfaatan sumberdaya tersebut telah menunjukkan sumbangan berarti bagi daerah. Pada tahun 2016 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Aceh Timur sebesar 45,97 persen atau senilai Rp. 3.899.883,8 juta) tetapi sebagian masyarakat khususnya nelayan masih belum mampu memanfaatkan sumberdaya secara optimal. Hal ini terlihat dari tingginya angka kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Aceh Timur. Pada tahun 2016 penduduk miskin di Kabupaten Aceh Timur berjumlah 61.630 jiwa atau sebesar 15,06 persen dan sebagian besar berada di wilayah pesisir dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 350.186/kapita/bulan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur, 2017).

Program minapolitan perikanan tangkap salah satunya ditujukan untuk mengembangkan wilayah pesisir dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap secara efektif dan efisien serta pengembangan sumberdaya perikanan. Dasar pelaksanaannya mengacu pada potensi perikanan dan masalah dalam perikanan tangkap. Sebagian besar nelayan di Aceh masih hidup di bawah garis kemiskinan. Selama ini, pengelolaan sumberdaya perikanan cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata dengan mengeksploitasi sumberdaya perikanan secara besar-besaran tanpa memperhatikan aspek keberlanjutannya. Ini berdampak pada kondisi sumberdaya perikanan khususnya di wilayah pantai mulai terancam keberlanjutannya. Hasil tangkapan beberapa jenis ikan terus mengalami penurunan. Kondisi seperti ini dapat terjadi karena semakin banyaknya komunitas pemanfaat sumberdaya atau semakin efektifnya alat tangkap yang digunakan namun daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) sumberdaya perikanan semakin menurun. Kondisi ini selain dapat menurunkan tingkat produktivitas dan pendapatan nelayan juga memicu terjadinya dampak sosial berupa konflik antar nelayan di wilayah pantai (Mulyani, 2013). Degradasi sumberdaya alam pesisir dan laut, kebanyakan terjadi karena perbuatan manusia (*anthropogenic*), baik akibat aktifitas produksi penangkapan ikan, maupun karena aktifitas non produksi, seperti pencemaran akibat limbah domestik maupun industri (Fauzi dan Anna, 2002).

Di Kabupaten Aceh Timur, sebagian besar dari nelayan bekerja sebagai nelayan kecil, buruh nelayan, pengolah ikan skala kecil dan pedagang kecil karena memiliki kemampuan investasi terbatas. Nelayan kecil hanya mampu memanfaatkan sumberdaya di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang terus menurun akibat persaingan dengan kapal besar dan penurunan mutu sumberdaya pantai. Hasil tangkapan (ikan) yang mudah rusak dapat melemahkan posisi tawar mereka dalam transaksi penjualan. Selain itu, pola hubungan eksploitatif antara pemilik modal dengan buruh dan nelayan, serta usaha nelayan yang bersifat musiman dan tidak menentu menyebabkan masyarakat miskin di kawasan pesisir cenderung sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan dan hutang dengan pemilik kapal. Berbagai peraturan, qanun, dan regulasi lain yang mengatur lingkungan hidup termasuk pesisir belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini didukung oleh Sugiharto *et al.* (2013) menyatakan bahwa perangkap kemiskinan yang melanda kehidupan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim-musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal serta akses, jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong terjadinya pengurasan sumberdaya laut secara berlebihan. Kemiskinan nelayan ditandai dengan tidak terpenuhinya hak-hak dasar nelayan antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan,

pekerjaan, dan infrastruktur. Potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang melimpah hingga kini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Keterbatasan nelayan menyebabkan posisi nelayan dominan sebagai buruh perikanan. Kondisi ini menciptakan hubungan patron klien dengan touke bangku atau pemilik modal. Diperkirakan adanya ketidakseimbangan antara besarnya pendapatan dan pengeluaran rumah tangga nelayan.

Kerangka Pemikiran Penelitian

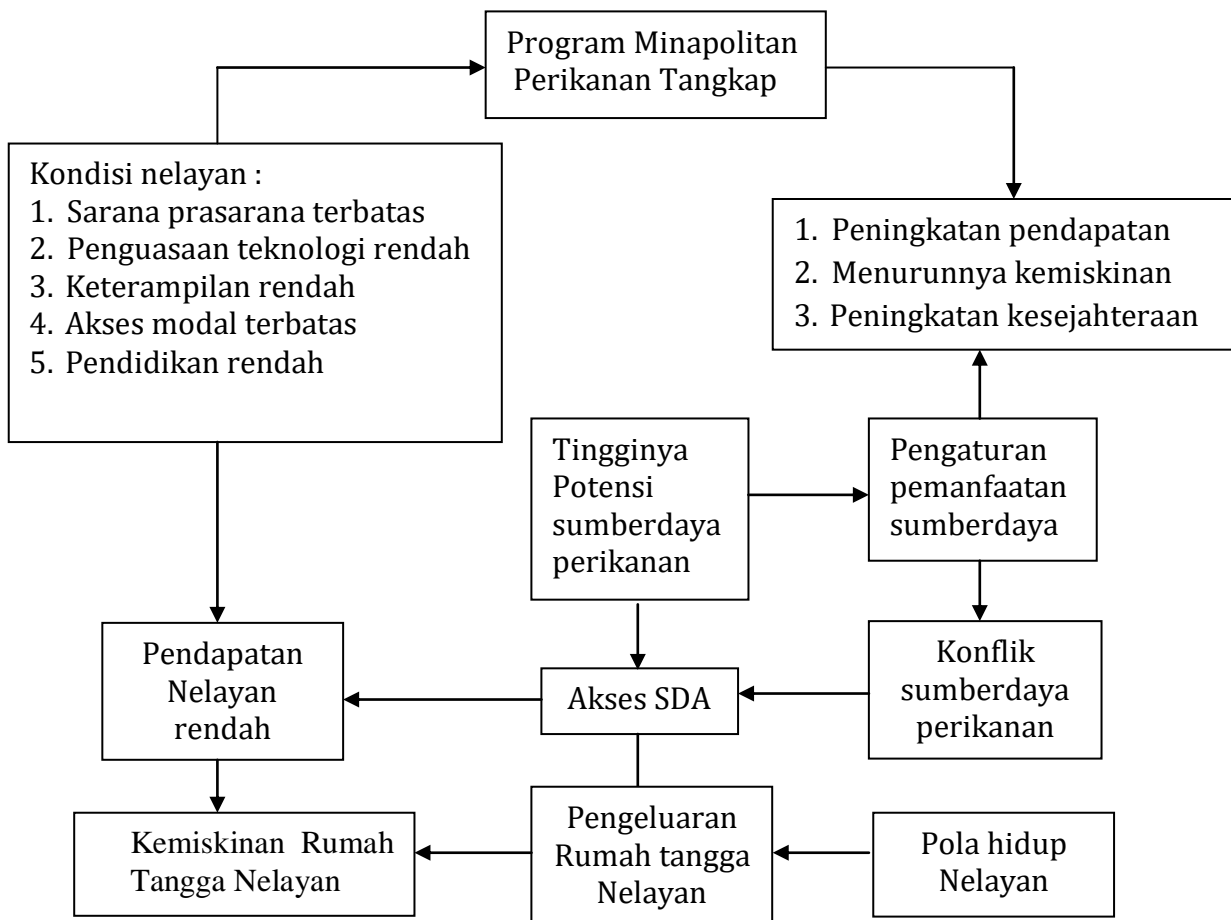
Program minapolitan merupakan program pemberdayaan nelayan dan pengembangan perikanan yang digulirkan pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan produk perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan (Gambar 2.1). Setiap kebijakan dibidang kelautan dan perikanan terganjal pada banyak masalah, dan hampir seluruh wilayah pesisir Indonesia termasuk Aceh mengalami masalah yang serupa khususnya nelayan tradisional. Masalah tersebut menurut Dahuri (2008) terletak pada: (1) daerah yang didiami nelayan pada umumnya terisolir, (2) akses jalan, pasar, dan jaringan komunikasi tidak tersedia, (3) pengetahuan dan keterampilan sangat rendah sehingga tidak menguasai teknologi perikanan tangkap dan budidaya, serta kemampuan berpikir antisipatif rendah, (4) rendahnya kemampuan penanganan dan pengolahan hasil-hasil perikanan dan kelautan, (5) terbatasnya sarana dan prasarana, dan (6) tidak memiliki modal usaha.

Kabupaten Aceh Timur memiliki armada penangkapan ikan sebanyak

121 unit kapal motor, 645 unit kapal motor tempel, perahu tanpa motor atau sampan sebanyak 462 unit. Pada tahun 2014, produksi ikan untuk perikanan tangkap mencapai 16.620,61 ton meningkat menjadi 27.474,29 ton pada tahun 2016 dengan nilai produksi sebesar Rp. 599.565.982,30. Dari nilai tersebut Kecamatan Idi Rayeuk merupakan penyumbang tertinggi sektor perikanan yakni produksi ikan mencapai 23.738,11 ton dan nilai produksi Rp. 511.395.991 (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, 2017). Adanya kenaikan produksi dan nilai produksi ikan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 mengindikasikan bahwa fungsi ekosistem berjalan dengan baik atau tingkat pemulihan dari jenis-jenis ikan tersebut masih berjalan baik serta adanya dukungan program pengembangan kawasan minapolitan yang digalakkan pemerintah Kabupaten Aceh Timur sejak tahun 2013. Semakin baik fungsi ekosistem maka secara tidak langsung risiko/ ancaman bagi keberlanjutan semakin kecil (Hartono et. al 2005).

Potensi sumber daya perikanan yang besar terindikasi belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat dari tingginya angka kemiskinan nelayan di wilayah pesisir Aceh yang tercermin dari lingkungan perumahan yang tidak sehat, terbatasnya fasilitas kesehatan dan minimnya sarana

pendidikan. Kondisi ini menjadi kendala dalam pembangunan ekonomi wilayah. Kondisi perikanan tangkap di Kabupaten Aceh Timur sebagian besar masih dalam bentuk usaha menengah dan kecil. Dari 1.314 unit armada yang bergerak dalam bidang perikanan tangkap, 687 unit berupa armada kapal motor kurang dari 5 GT (gross tonase) atau 52,2 % (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, 2017). Akibatnya ruang gerak nelayan menjadi terbatas karena tidak mampu beroperasi lebih sehingga konsentrasi daerah penangkapan (*fishing ground*) berada di perairan kurang dari 4 mil laut. Hal ini menyebabkan rendahnya pendapatan nelayan. Di sisi lain, pola hidup nelayan menentukan besarnya pengeluaran rumah tangga nelayan. Pada kondisi ini, program pemberdayaan nelayan menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan peningkatan kesejahteraan nelayan dapat dilakukan melalui: (1) penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga, (2) mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (*self financing mechanism*), (3) mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna, (4) mendekatkan masyarakat dengan pasar, serta (5) membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat (Nikijuluw, 2001).



Gambar 2.1. Kerangka pemikiran penelitian

2. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penentuan kabupaten dilakukan secara *purposive*, yaitu Kabupaten Aceh Timur sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013. Penentuan kecamatan dilakukan secara *purposive sampling* yaitu Kecamatan Darul Aman dan Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

Metode Analisis

Struktur pendapatan rumah tangga nelayan merupakan rangkaian sumber pendapatan yang diperoleh nelayan dan anggota keluarganya, baik yang bersumber dari kegiatan perikanan seperti menangkap ikan, pengolahan ikan, pemasaran ikan maupun dari sumber lain diluar kegiatan perikanan. Struktur pengeluaran rumah tangga nelayan terdiri atas pengeluaran pangan, non pangan, tembakau, pendidikan, dan kesehatan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN METODE

Struktur Pendapatan Rumah Tangga Nelayan pada Kawasan Minapolitan

Sumber utama pendapatan rumahtangga nelayan adalah hasil penjualan ikan yang sangat tergantung kepada musim dan besarnya hasil tangkapan. Aktifitas nelayan sebagian besar pada usaha penangkapan ikan seperti perbaikan alat tangkap (jaring), pengolahan ikan, pengangkutan, dan pemasaran ikan. Aktifitas lain yang mungkin dilakukan adalah berdagang dan kegiatan di luar pertanian. Namun sebagian besar nelayan hanya mengantungkan hidupnya dari kegiatan penangkapan ikan.

Pada rumah tangga nelayan, penangkapan ikan merupakan pekerjaan laki-laki. Selain secara fisik merupakan lapangan pekerjaan yang tinggi resiko, wanita sulit untuk terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan karena sangat bertentangan dengan waktu pengasuhan anak-anak (Subri, 2007). Kegiatan wanita pada perikanan cenderung pada kegiatan pengolahan (agroindustri perikanan) terutama disaat terjadi penurunan harga ikan. Kegiatan di luar dan di dalam perikanan yang dilaksanakan pada musim penangkapan ikan memberikan corak yang berbeda terhadap perilaku ekonomi rumah tangga nelayan. Adanya hubungan komplementer antara kegiatan melaut dengan kegiatan agroindustri perikanan. Jika besarnya pendapatan dari laut menurun maka rumah tangga nelayan cenderung meningkatkan jumlah curahan kerja pada kegiatan agroindustri perikanan.

Tingkat pendapatan bersih nelayan merupakan selisih antara penjualan ikan dengan biaya penangkapan ikan. Biaya penangkapan ikan terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya penyusutan dan pemeliharaan dari sarana dan prasarana ikan yang digunakan. Biaya variabel terdiri dari biaya bahan bakar minyak (BBM) dan oli, es batu, konsumsi, dan rokok yang digunakan nelayan dalam 1 (satu) trip melaut. Menurut Subri (2007) biaya produksi dalam usaha penangkapan ikan oleh nelayan terdiri dari dua kategori yaitu biaya pengeluaran nyata dan biaya yang tidak merupakan pengeluaran nyata. Biaya pengeluaran nyata adalah : (1) bahan bakar dan oli, (2) bahan pengawet : es dan garam, (3) pengeluaran untuk makanan/konsumsi nelayan, (4) pengeluaran untuk reparasi, dan (5) pengeluaran untuk retribusi dan pajak. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak nyata adalah penyusutan dari perahu/kapal, mesin-mesin dan alat tangkap.

Pada musim panen ikan antara bulan Desember hingga bulan Maret, jumlah tangkapan ikan per hari sebanyak 2 ton ikan. Rata-rata pendapatan nelayan yang menggunakan perahu bermotor berkisar antara Rp. 50.000/hari hingga Rp. 100.000/hari dan nelayan hanya melaut 5 hari dalam seminggu. Jika pendapatan rata-rata nelayan dikonversi dalam seminggu adalah minimal Rp. 35.714,29/hari, hingga Rp. 71.428,57/hari. Jika diasumsikan anggota keluarga sebanyak 5 orang, maka pendapatan minimum Rp. 7.142,86 per kapita per hari dan maksimum Rp. 14.285,71 per kapita per

hari atau Rp. 428.571,30 per kapita per bulan.

Jika usaha penangkapan ikan menggunakan kapal (dilakukan oleh nelayan sebanyak 20 orang hingga 25 orang) dengan lama penangkapan 3 hari (3 x 24 jam), maka pendapatan nelayan ditentukan oleh sistem bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal. Sistem bagi hasil merupakan salah satu aspek kelembagaan dalam produksi berupa perjanjian pembagian hasil tangkapan ikan yang berlaku antara nelayan dengan pemilik kapal/perahu beserta perjanjian lainnya yang mengikat. Dalam pelaksanaannya, sistem bagi hasil meskipun tidak tertulis hanya berlandaskan kepercayaan kedua belah pihak namun ketentuan hukumnya sangat mengikat. Bagi hasil ini memiliki cara yang berbeda-beda tergantung pada jenis alat tangkap dan sarana penangkapan ikan (perahu/kapal) dikarenakan oleh adanya perbedaan modal yang dikeluarkan, maka bagian pemilik kapal akan lebih besar bila dibandingkan dengan sistem bagi hasil pada perahu, dan adanya perbedaan besarnya resiko kerusakan sarana pada saat digunakan dalam kegiatan melaut.

Tabel 1. Sistem Bagi Hasil pada Usaha Penangkapan Ikan

No.	Distribusi Pekerjaan	Jumlah Pekerja (Orang)	Pembagian Hasil (Bagian)
1.	Pawang	1	5,0
2.	Wakil	1	4,0
3.	Pawang	2	3,0
4.	Tukang	1	2,5
5.	Lampu Masnage ABK	15	1,0
	Jumlah	0	15,5

Sumber : Data Primer (Diolah), 2018

Ikan hasil tangkapan dijual oleh touke bangku. Touke bangku merupakan pemilik modal atau orang yang ditugaskan oleh pemilik modal untuk mengelola kapal. Jika touke bangku bukan pemilik kapal maka biaya operasional dalam penangkapan ikan ditanggung oleh touke bangku sedangkan pemilik modal hanya menyediakan kapal dan sarana penangkapan ikan. Hasil penjualan ikan yang diperoleh dikurangi dengan biaya bahan bakar solar 100 lt seharga Rp. 6.500/lt sebesar Rp. 650.000. Makanan selama 5 hari untuk 20 orang sebesar Rp. 1.000.000, penggunaan es sebanyak 50 bak (1 bak @ Rp. 25.000/bak) sebesar Rp. 1.250.000. Biaya bahan bakar, makanan dan es ditanggung oleh touke sedangkan rokok ditanggung oleh nelayan. Setelah dikurangi biaya bahan bakar selanjutnya dipotong 10% dari hasil penjualan ikan untuk pemilik modal, dan sisanya dibagi sebesar 40% untuk touke bangku dan 60% untuk nelayan yang ikut melaut. Bagian 60% untuk nelayan dibagi kepada 20 orang nelayan yang ikut melaut. Pembagian hasil diantara nelayan tersebut dibagi berdasarkan tugasnya masing-masing di kapal saat melaut sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1. Anak buah kapal (15 orang) hanya memperoleh 1/15 bagian dari 1 bagian (dari bagian 60% setelah dikurangi bagian 40% untuk touke bangku). Dalam hal ini, pawang terkadang juga mendapat bonus tambahan dari touke bangku. Sistem pembagian hasil ini jelas sangat menguntungkan touke bangku atau pemilik modal. Penerimaan nelayan atau anak buah kapal tak sebanding dengan waktu yang digunakan untuk melaut dan bersifat fluktuatif tergantung

banyaknya ikan tangkapan dan harga jual ikan.

Penghasilan rata-rata ABK (Anak Buah Kapal) sebesar Rp. 50.000/hari hingga Rp. 100.000/hari dan hanya melaut selama 5 hingga 14 hari dalam seminggu tergantung besarnya tangkapan ikan dan persediaan stock untuk melaut. Jika tidak ada keuntungan melaut atau perolehan hasil penjualan ikan hanya mampu menutupi biaya operasional maka nelayan yang ikut melaut tidak memiliki pendapatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka nelayan akan berhutang kepada touke bangku. Hal inilah yang mendasari terbentuknya hubungan patron klien antara nelayan dengan pemilik modal. Jika perolehan hasil penjualan ikan tidak mampu menutupi biaya operasional, maka kerugian ditanggung oleh touke. Keterbatasan nelayan dalam kepemilikan alat tangkap menyebabkan minimnya pendapatan nelayan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan adalah fluktuasi musim tangkapan, kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia (SDM) nelayan, eksploitasi pemodal, ketimpangan dalam sistem bagi hasil, motorisasi, dan pola hidup nelayan (Jamilah, 2015).

Tingkat pendapatan rumah tangga nelayan ditentukan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor internal berkaitan dengan kemampuan teknis dan manajemen. Dalam hal teknis hanya memiliki perahu dan alat tangkap yang terbatas. Dalam hal manajemen, nelayan sulit merubah sikap dan perilaku kearah pengembangan usaha sebagai akibat tingkat pendidikan yang umumnya rendah. Faktor eksternal berkaitan dengan degradasi lingkungan, kelembagaan ekonomi, dan konversi lahan. Kontribusi pendapatan rumah tangga nelayan pemilik perahu dari kegiatan penangkapan ikan berkisar 36,05% dan kegiatan diluar penangkapan ikan sebesar 63,95%. Sedangkan bagi rumah tangga nelayan buruh, kontribusi pendapatan dari kegiatan melaut sebesar 79,5% dan kegiatan non melaut sebesar 20,5%. Kondisi ini terjadi karena nelayan buruh tidak memiliki asset produksi dan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan nelayan buruh sulit melakukan perubahan perilaku pendapatan di luar kegiatan melaut (Nuraisah, 2000).

Tabel 2. Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Kabupaten Aceh Timur

Kecamatan	Lokasi Unit Pengolahan Ikan	Jenis
Darul Aman	Seuneubok Baro	Penggaraman ikan
Idi Rayeuk	Blang Geulumpang	Penggaraman ikan & pindang ikan
	Ketapang mameh	Penggaraman ikan & abon ikan
	Calok Geulima	Penggaraman ikan & pembuatan terasi/belacan
	Kuala Peudawa Puntong	Penggaraman ikan
Idi Timur	Matang Rayeuk PP	Penggaraman ikan
Peudawa	Kuala Peudawa	Penggaraman ikan
	Kampong Keudee	Penggaraman ikan

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur, 2017.

Jika terjadi penurunan harga jual ikan di tingkat nelayan, maka nelayan cenderung melakukan kegiatan

pengolahan. Umumnya kegiatan ini dilakukan oleh wanita (isteri atau remaja putri). Pola nafkah ganda merupakan perilaku rumah tangga nelayan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Adapun kegiatan pengolahan ikan dimaksud adalah pengeringan ikan (misalnya ikan teri, ikan kayu), penggaraman ikan, pengasapan ikan, pembuatan abon ikan, pindang ikan, dan terasi. Unit pengolahan ikan tersebar di beberapa kecamatan sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2. Aktivitas pengolahan ikan merupakan agroindustri berbasis ikan skala rumah tangga dan relatif sedikit dilakukan karena nelayan di Kabupaten Aceh Timur cenderung menjual ikan segar baik dalam wilayah kabupaten (sekitar 40% dari total produksi ikan) maupun luar kabupaten (sekitar 60% dari total produksi ikan). Sebagian besar ikan di ekspor ke Malaysia. Hal ini terjadi karena belum adanya investasi skala perusahaan dibidang pengolahan ikan.

Industri perikanan dengan investasi skala perusahaan sangat mungkin dikembangkan di Propinsi Aceh, mengingat tingginya potensi perikanan dan sumberdaya perikanan, ketersediaan lahan, dan tingginya permintaan produk olahan berbasis ikan di tingkat konsumen baik nasional maupun internasional. Integrasi secara sinergik antara pemerintah daerah, swasta, perbankan, lembaga swadaya lokal dan asing akan menjadi pilar utama pengembangan agroindustri perikanan

di Propinsi Aceh sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan, mengurangi angka kemiskinan masyarakat pesisir, menciptakan nilai tambah produk, meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi gejolak sosial dalam masyarakat, dan meningkatkan perekonomian daerah dan nasional.

Struktur Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan pada Kawasan Minapolitan

Struktur pengeluaran rumah tangga nelayan ditentukan oleh tingkat pendapatan rumah tangga. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan suatu keluarga selama sebulan untuk konsumsi semua anggota keluarga. Pengeluaran keluarga untuk pangan dan non-pangan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan (BPS 1998). Struktur pengeluaran rumah tangga nelayan terdiri atas pengeluaran pangan, non pangan, tembakau, pendidikan, dan kesehatan. BPS (2002) membagi pengeluaran keluarga menjadi pengeluaran untuk pangan dan non-pangan. Pengeluaran untuk pangan yaitu pengeluaran untuk konsumsi kelompok padi-padian, ikan, daging, telur, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, minuman, makanan, serta minuman jadi. Sementara pengeluaran untuk non-pangan adalah pengeluaran untuk konsumsi perumahan, bahan bakar, penerangan, air, barang dan jasa, pakaian, dan barang-barang tahan lama lainnya.

Umumnya nelayan akan mendahulukan pengeluaran untuk konsumsi pangan. Jika pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran

konsumsi meningkat, menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan semakin meningkat. Rumah tangga nelayan akan cenderung mengurangi curahan kerja dan meningkatkan waktu luang jika pendapatan meningkat. Alokasi pengeluaran terbesar adalah pengeluaran pangan sebesar 80,7%, pengeluaran non pangan sebesar 13,9%, sedangkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan sebesar 5,4%. Lokasi desa nelayan yang dekat pusat kota menyebabkan masyarakat nelayan pesisir berada pada fase transisi, yaitu pola kehidupan sehari-hari masih bersifat desa tetapi pola konsumsi cenderung menunjukkan masyarakat kota (urban). Hal ini akan mempengaruhi besarnya pengeluaran rumah tangga nelayan yang berada di sekitar pusat kota atau jauh dari pusat kota. Peningkatan harga-harga kebutuhan hidup memaksa setiap keluarga yang berpendapatan rendah untuk melakukan tindakan memprioritaskan pengeluaran untuk pangan (Sulaeman, 2008). Lebih lanjut Suhardjo (1989) mengemukakan bahwa pendapatan sangat berpengaruh terhadap alokasi pengeluaran keluarga. Keluarga dengan pendapatan rendah akan menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk pangan sebagai kebutuhan pokok. Ada kecenderungan makin tinggi tingkat pendapatan keluarga maka makin rendah elastisitas konsumsi pangan dibanding konsumsi bukan pangan (Mangkuprawira, 1985).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Pendapatan nelayan ditentukan oleh fluktuasi harga ikan dan besarnya tangkapan yang dipengaruhi oleh fluktuasi musim tangkapan, sarana penangkapan ikan, dan sistem bagi hasil antara nelayan dengan pemilik modal. Pola hubungan eksploitatif antara pemilik modal dengan nelayan, serta usaha penangkapan nelayan yang bersifat musiman menyebabkan nelayan miskin di kawasan pesisir cenderung sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan dan hutang dengan pemilik kapal.
- b. Rata-rata pendapatan nelayan yang menggunakan perahu bermotor berkisar antara Rp. 50.000/hari hingga Rp. 100.000/hari. Jika diasumsikan anggota keluarga sebanyak 5 orang, maka pendapatan minimum Rp. 7.142,86 per kapita per hari dan maksimum Rp. 14.285,71 per kapita per hari atau Rp. 428.571,30 per kapita per bulan.
- c. Alokasi pengeluaran terbesar adalah pengeluaran pangan sebesar 80,7%, pengeluaran non pangan sebesar 13,9%, sedangkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan sebesar 5,4%. Lokasi desa nelayan yang dekat dengan pusat kota menyebabkan nelayan pesisir berada pada fase transisi dengan pola kehidupan sehari-hari masih bersifat desa tetapi pola konsumsi cenderung menunjukkan masyarakat kota. Hal ini akan mempengaruhi besarnya pengeluaran rumah tangga nelayan.
- d. Pengembangan Kabupaten Aceh Timur melalui Program Minapolitan belum memberikan hasil maksimal, saat ini berada pada tahap pengembangan infrastruktur dan

belum mencapai tahap pengembangan sumberdaya perikanan terutama nelayan.

Saran

Pengembangan perikanan dan potensi sumberdaya perikanan dengan pendekatan pengembangan agroindustri perikanan melalui program minapolitan diharapkan dapat mengatasi masalah fluktuasi harga ikan, menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja, mengurangi ketergantungan terhadap pemilik modal, dan meningkatkan pendapatan nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2002. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur. 2017. *Angka Kemiskinan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010-2016*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur. Idi Rayeuk. <https://acehtimurkab.bps.go.id>.
- Dahuri, R. 2008. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur. 2017. *Laporan Tahunan Program Minapolitan*. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur. Idi Rayeuk.
- Fauzi A dan S Anna. 2002. Evaluasi Status Keberlanjutan Pembangunan Perikanan : Aplikasi Pendekatan Rappfish (Studi Kasus Perairan Pesisir DKI Jakarta). *Jurnal Pesisir dan Lautan Indonesia*. 4(2): 36-49.
- Hartono. et al. 2005. Pengembangan Teknik Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH) untuk Penentuan Indikator Kinerja Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Indonesia. *Buletin Ekonomi Perikanan*. 6(1).
- Jamilah. 2015. Analisis Ketidakpastian Pendapatan Nelayan Aceh. *Jurnal E-Mabis*. 16(1): 120-127.
- Mangkuprawira S. 1985. Alokasi waktu dan kontribusi kerja anggota keluarga dalam kegiatan ekonomi rumah tangga (studi kasus di dua tipe Desa di Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat). *Disertasi*. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Mulyani AT. 2013. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta. *Tesis*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Nuraisah. 2000. Analisis Ekonomi Alokasi Waktu, Pendapatan, dan Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan Di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. *Skripsi*. Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Nuraisah. 2000. Analisis Ekonomi Alokasi Waktu, Pendapatan, dan Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan Di Desa Cikahuripan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. *Skripsi*. Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Subri M. 2005. *Ekonomi kelautan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 224 hal.
- Sugiharto E, Salmani, Gunawan BI. 2013. Studi tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Kampung Gurimbang Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Dalam: *Jurnal Ilmu Perikanan Tropis*. 3(2): 87-94.
- Suhardjo. 1989. *Sosio Budaya Gizi*. Bogor: Pusat Antara Universitas Pangan dan Gizi, Institut Pertanian Bogor.
- Sulaeman, D.P. 2008. Analisis Alokasi Pengeluaran Keluarga Peserta dan Bukan Peserta Proyek Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan. *Skripsi*. Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.